

BAB II

KERANGKA TEORI/KERANGKA KONSEP

2.1 Penelitian Terdahulu

Ketika membicarakan perkembangan dalam kajian jurnalisme, *constructive journalism* menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, khususnya dalam memahami bagaimana pendekatan ini dipraktikkan, dampaknya terhadap audiens, dan penerapannya pada pemberitaan isu sosial. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat dari tiga kecenderungan utama, yaitu studi mengenai praktik dan persepsi jurnalis, dampak terhadap audiens, dan relevansi pendekatan ini dalam peliputan isu sosial tertentu.

Dalam konteks praktik jurnalistik, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa *constructive journalism* tidak dipahami sebagai genre atau format berita baru, melainkan sebagai pendekatan atau orientasi profesional. Hermans dan Gyldensted (2018) menjelaskan bahwa pendekatan ini menekankan keseimbangan antara pelaporan masalah dengan penyajian konteks, solusi, dan orientasi masa depan berbasis bukti. Dengan demikian, *constructive journalism* tidak sekadar menambahkan informasi positif, tetapi memperluas perspektif pemberitaan agar audiens dapat memahami isu secara lebih komprehensif. Pemahaman semacam ini diperkuat oleh van Antwerpen dan Hermans (2026) yang melalui wawancara terhadap praktisi jurnalistik menemukan bahwa *constructive journalism* lebih sering dimaknai sebagai sebuah pola pikir (*mindset*) atau pendekatan berbasis prinsip dibandingkan sebagai seperangkat teknik baku. Dengan demikian, para jurnalis kerap kesulitan menjelaskan prosedur praktisnya secara spesifik.

Lebih lanjut, Aitamurto dan Varma (2018) menunjukkan bahwa jurnalis memosisikan pendekatan konstruktif sebagai bagian dari perluasan fungsi sosial jurnalisme, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar seperti akurasi, independensi, dan verifikasi. Dalam hal ini, *constructive journalism* dipahami sebagai kerangka berpikir yang memengaruhi proses editorial, mulai dari pemilihan sudut pandang hingga penyusunan narasi berita. Kecenderungan jurnalis untuk tetap

mengintegrasikan pendekatan ini pada nilai-nilai jurnalistik konvensional juga terlihat dalam penelitian Leonhardt dan Löhmann (2026) di Austria. Penelitian tersebut menemukan bahwa jurnalis konstruktif memosisikan diri melalui proses penarikan batas (*boundary work*), yaitu dengan menggunakan peran, nilai, dan praktik yang dinarasikan sebagai penanda yang membedakan diri mereka dari jurnalisisme konvensional tanpa sepenuhnya keluar dari pakem profesi mereka.

Dari sisi sikap profesional, jurnalis cenderung menerima pendekatan ini selama tetap berada dalam koridor nilai jurnalistik. Lough dan McIntyre (2018) menunjukkan bahwa pemberitaan berbasis solusi dapat diterima apabila dilakukan secara kritis, yaitu dengan menjelaskan proses, efektivitas, dan keterbatasan solusi yang diangkat. Hal ini menunjukkan bahwa *constructive journalism* tidak menggantikan fungsi kritis jurnalisisme, tetapi justru melengkapinya.

Namun demikian, penerapan pendekatan ini dalam praktik sehari-hari masih menghadapi berbagai tantangan. Fölscher-Kingwill dan Wasserman (2026) menemukan bahwa rutinitas redaksi, tekanan kecepatan produksi berita, dan budaya jurnalistik yang menekankan konflik menjadi hambatan utama dalam implementasi *constructive journalism*. Kondisi ini menyebabkan penerapan pendekatan konstruktif sering kali bersifat parsial dan tidak sistematis. Tantangan struktural serupa juga ditemukan oleh Jackson et al. (2025) dalam kajian terhadap kampanye *solutions journalism* di sejumlah ruang redaksi lokal di Inggris. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan berorientasi solusi lebih sering hadir dalam bentuk proyek atau kampanye editorial tertentu dibandingkan menjadi bagian dari rutinitas peliputan sehari-hari, terutama dalam konteks redaksi dengan keterbatasan waktu dan sumber daya. Temuan ini menegaskan bahwa hambatan implementasi *constructive journalism* tidak hanya berkaitan dengan pemahaman individual jurnalis, tetapi juga dengan kondisi organisasi dan ritme kerja redaksi tempat pendekatan ini diterapkan.

Dalam konteks Indonesia, Ariestyani (2023) menunjukkan bahwa banyak jurnalis belum familiar secara terminologis dengan istilah *constructive journalism*,

walaupun secara intuitif telah menerapkan prinsip-prinsipnya dalam praktik pemberitaan. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan utama bukan terletak pada penolakan terhadap pendekatan tersebut, tetapi pada belum meratanya pemahaman dan belum terintegrasinya pendekatan ini dalam kebijakan redaksi media.

Kemudian, selain faktor struktural, terdapat pula dilema normatif dalam penerapan *constructive journalism*. Aitamurto dan Varma (2018) serta van Antwerpen dan Hermans (2026) menunjukkan bahwa jurnalis menghadapi ketegangan antara kebutuhan untuk menyajikan berita yang konstruktif dengan kekhawatiran akan hilangnya objektivitas. Dalam beberapa konteks, penekanan pada solusi dapat dipersepsikan sebagai bentuk keberpihakan atau advokasi. Hal ini juga terlihat dalam penelitian Allam (2019) yang menunjukkan bahwa jurnalis cenderung berhati-hati dalam menyajikan narasi solusi karena khawatir dianggap mempromosikan kepentingan tertentu.

Dinamika ketegangan terhadap sisi objektivitas ini ditelaah lebih jauh oleh Garusi dan Leonhardt (2026) yang menemukan bahwa jurnalis konstruktif justru berupaya menjaga kepercayaan publik dengan tetap berpegang pada nilai objektivitas, terutama melalui pemisahan antara fakta dan opini serta penyandaran solusi pada sumber-sumber yang dianggap kredibel. Dengan demikian, penerapan *constructive journalism* sangat dipengaruhi oleh konteks politik, budaya media, dan nilai profesional yang dianut oleh jurnalis.

Pada sisi yang lain, sejumlah penelitian juga mengkaji dampak *constructive journalism* terhadap audiens. McIntyre (2019) menunjukkan bahwa pemberitaan konstruktif mampu menurunkan afek negatif sekaligus meningkatkan afek positif tanpa mengurangi persepsi terhadap kredibilitas berita. Temuan ini diperkuat oleh Rusch et al. (2021) yang menunjukkan bahwa penyajian solusi dapat meningkatkan rasa mampu (*self-efficacy*) dan optimisme audiens.

Dalam konteks media digital, Overgaard (2023) menemukan bahwa konten konstruktif, bahkan dalam bentuk singkat, tetap mampu memicu emosi positif serta mendorong keterlibatan awal audiens. Namun demikian, Hermans dan Prins (2022)

dan Baden et al. (2018) menunjukkan bahwa dampak tersebut cenderung terbatas pada keterlibatan ringan dan belum secara konsisten berlanjut pada perubahan perilaku yang lebih kompleks. Selain itu, Meier (2018) menekankan bahwa pendekatan konstruktif tetap harus disertai dengan pelaporan yang kritis dan berbasis bukti agar tidak mengaburkan fungsi utama jurnalisme.

Ketidakkonsistenan hasil kajian dampak ini sebagian dijelaskan oleh Mack et al. (2025), yang menilai bahwa salah satu penyebab utamanya adalah belum adanya definisi *constructive journalism* yang seragam serta lemahnya landasan teoretis. Untuk mengatasi hal tersebut, mereka menawarkan definisi berbasis konten dengan tiga dimensi, yaitu keseimbangan (*balance*), penyajian secara faktual (*matter-of-factness*), dan fokus pada solusi. Pandangan ini menunjukkan bahwa keragaman operasionalisasi *constructive journalism* tidak hanya menjadi persoalan dalam kajian dampak, tetapi juga berimplikasi pada cara pendekatan ini diterjemahkan ke dalam praktik dan teks pemberitaan.

Meskipun berbagai penelitian menunjukkan bahwa *constructive journalism* memberikan dampak positif terhadap pengalaman audiens, sebagian besar kajian tersebut masih dilakukan dalam konteks isu umum dan belum banyak diterapkan pada isu sosial yang memiliki sensitivitas tinggi. Padahal, dalam isu-isu tertentu, praktik pemberitaan tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga dengan pendekatan media membentuk pemahaman publik terhadap kelompok, peristiwa, dan relasi sosial tertentu.

Salah satu kajian yang mulai menjembatani celah ini adalah Uibu (2023) yang meneliti penerapan pesan konstruktif dalam pemberitaan daring mengenai kekerasan dalam rumah tangga di Australia. Penelitian tersebut menemukan bahwa walaupun pemberitaan konstruktif terhadap isu kekerasan meningkat, liputan tersebut cenderung bersifat episodik dan masih minim konteks yang dapat membantu publik memahami faktor sosial di balik kekerasan. Temuan Uibu (2023) menunjukkan bahwa penerapan *constructive journalism* pada isu kekerasan menghadapi tantangannya tersendiri. Dengan demikian, pendekatan ini menjadi

relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks isu sosial yang kompleks, salah satunya pemberitaan mengenai kekerasan seksual.

Dalam konteks isu sosial, pemberitaan kekerasan seksual menjadi salah satu isu yang memiliki kompleksitas tinggi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa media masih menghadapi permasalahan seperti *victim blaming*, penggunaan bahasa yang bias, serta framing yang cenderung merugikan korban (Andrews et al., 2026; Aroustamian, 2019). Secara lebih rinci, Andrews et al. (2026) melalui tinjauan literatur tematik atas 41 artikel mengidentifikasi tujuh persoalan berulang dalam pemberitaan kekerasan seksual. Lima di antaranya berkaitan dengan isi pemberitaan, seperti mitos perkosaan, bahasa yang menyalahkan, *framing* yang bermasalah, pengabaian interseksionalitas, dan penggunaan sumber yang bias, sedangkan dua lainnya berkaitan dengan proses, yaitu tantangan struktural yang dihadapi jurnalis serta minimnya edukasi dan pedoman etis. Sementara itu, Aroustamian (2019) menegaskan bahwa kekerasan seksual perlu diposisikan sebagai persoalan kebijakan publik, bukan sekadar peristiwa individual. Tujuannya agar pemberitaan tidak berhenti pada level kasus.

Dalam konteks Indonesia, Safira et al. (2022) menunjukkan bahwa pemberitaan kekerasan seksual masih memarginalkan korban melalui penggunaan bahasa yang tidak memihak, seperti kalimat pasif dan nominalisasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa media memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang publik terhadap isu kekerasan seksual, termasuk dalam menentukan bagaimana korban dan pelaku direpresentasikan.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pemberitaan kekerasan seksual tidak hanya berkaitan dengan penyampaian fakta, tetapi juga dengan cara pendekatan media membangun pemahaman publik terhadap isu tersebut. Dalam konteks ini, pendekatan *constructive journalism* menjadi relevan karena menawarkan pemberitaan yang tidak hanya berfokus pada konflik dan peristiwa, tetapi juga menghadirkan konteks, perspektif yang lebih berimbang, serta kemungkinan solusi terhadap permasalahan sosial.

Berdasarkan tiga kecenderungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai *constructive journalism* sejauh ini masih banyak berfokus pada dampaknya terhadap audiens serta persepsi dan sikap jurnalis. Sementara itu, penelitian yang secara langsung mengkaji penerapan *constructive journalism* dalam teks pemberitaan masih relatif terbatas. Keterbatasan ini semakin terlihat pada isu yang memiliki sensitivitas tinggi, seperti kekerasan seksual. Kajian mengenai pemberitaan kekerasan seksual selama ini lebih banyak menelaah aspek framing, bahasa, dan representasi korban daripada menggunakan kerangka *constructive journalism*. Dengan demikian, kajian *constructive journalism* dan kajian pemberitaan kekerasan seksual sebagian besar masih berkembang secara terpisah, terutama dalam konteks media daring di Indonesia.

Selain keterbatasan tersebut, terdapat persoalan yang lebih mendasar pada tingkat konseptual. Mack et al. (2025) menilai bahwa *constructive journalism* belum memiliki definisi yang baku dan landasan teoretis yang seragam sehingga pendekatan ini dioperasionalkan secara berbeda dari satu penelitian ke penelitian lain. McIntyre dan Gyldensted (2017) juga menjelaskan bahwa penerapannya dapat mengikuti kerangka yang berbeda sesuai dengan konteks masing-masing organisasi media. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerangka analisis yang digunakan peneliti belum tentu identik dengan kerangka praktik yang digunakan redaksi dalam proses produksi berita. Namun, hubungan antara kedua kerangka tersebut belum banyak dikaji, terutama karena penelitian yang menghubungkan analisis teks dengan praktik redaksi dalam satu penelitian masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis penerapan *constructive journalism* dalam pemberitaan *Tempo.co* mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi, sekaligus memahami bagaimana pendekatan tersebut dijalankan dalam praktik redaksi. Dengan menyandingkan analisis teks dan wawancara terhadap jurnalis yang terlibat langsung, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi elemen *constructive journalism* dalam teks, tetapi juga memahami praktik redaksi yang melatarbelakangi kemunculan elemen-elemen tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah kajian mengenai

penerapan *constructive journalism*, tetapi juga memberikan bukti empiris mengenai bagaimana pendekatan tersebut diterjemahkan dan dijalankan dalam praktik redaksi.

2.2 Teori atau Konsep yang digunakan

2.2.1 *Social Responsibility Theory*

Teori tanggung jawab sosial pers (*Social Responsibility Theory*) merupakan teori normatif dalam kajian komunikasi massa yang menempatkan kebebasan pers berdampingan dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Peterson merumuskan premis utama teori ini melalui pernyataan, “*freedom carries concomitant obligations*” (Peterson, 1963, p. 74). Artinya, kebebasan yang dimiliki pers juga disertai kewajiban untuk menjalankan fungsi komunikasi massa yang dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian, kebebasan pers tidak hanya dipahami sebagai hak media untuk bekerja tanpa tekanan, tetapi juga sebagai tanggung jawab untuk menggunakan kebebasan tersebut bagi kepentingan publik.

Teori ini berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan teori libertarian. Teori libertarian beranggapan bahwa apabila pers dibebaskan dari campur tangan negara, berbagai gagasan akan bersaing secara terbuka dan kebenaran akan muncul melalui proses tersebut. Namun, Peterson (1963) menilai bahwa pandangan ini semakin sulit dipertahankan ketika kepemilikan dan pengelolaan media terkonsentrasi pada sejumlah kecil pihak. Dalam kondisi tersebut, masyarakat semakin bergantung pada keputusan pengelola media dalam menentukan informasi, fakta, dan sudut pandang yang dapat diterima oleh publik (Peterson, 1963, p. 87).

Fungsi pers dalam *Social Responsibility Theory* pada dasarnya tidak berbeda jauh dari fungsi pers dalam teori libertarian. Peterson (1963, p. 74) menyebutkan setidaknya enam fungsi pers, yaitu memberikan informasi dan ruang perdebatan mengenai kepentingan publik, membantu masyarakat agar mampu menjalankan pemerintahan sendiri, menjaga hak individu melalui fungsi

pengawasan, mendukung kegiatan ekonomi, menyediakan hiburan, dan mempertahankan kemandirian finansial media. Perbedaannya terletak pada penilaian bahwa pers belum selalu menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara memadai. Oleh karena itu, fungsi pers tidak cukup hanya diakui, tetapi perlu dijalankan dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Kewajiban sosial pers dijelaskan lebih lanjut oleh Komisi Kebebasan Pers melalui laporan *A Free and Responsible Press*. Komisi tersebut merumuskan lima kebutuhan masyarakat terhadap pers. Pertama, pers perlu menyajikan laporan yang benar, menyeluruh, dan dapat dipahami mengenai peristiwa sehari-hari dalam konteks yang memberikan makna. Kedua, pers perlu menyediakan ruang bagi pertukaran komentar dan kritik. Ketiga, pers perlu menggambarkan kelompok-kelompok dalam masyarakat secara representatif. Keempat, pers perlu menyajikan dan menjelaskan tujuan serta nilai-nilai masyarakat. Kelima, pers perlu memberikan akses yang luas terhadap informasi yang dibutuhkan publik (Commission on Freedom of the Press, 1947, pp. 20–28). Kelima tuntutan tersebut menjadi penjelasan konkret mengenai bentuk tanggung jawab sosial yang perlu dijalankan pers.

Tuntutan pertama menunjukkan bahwa ketepatan fakta saja belum cukup untuk menghasilkan pemberitaan yang benar dan utuh. Komisi Kebebasan Pers menyatakan bahwa “*it is no longer enough to report the fact truthfully. It is now necessary to report the truth about the fact*” (Commission on Freedom of the Press, 1947, p. 22). Sebuah fakta dapat disampaikan secara akurat, tetapi tetap menyesatkan apabila dipisahkan dari latar belakang, hubungan sebab-akibat, dan keadaan yang membuat fakta tersebut dapat dipahami. Peterson menyebut keadaan tersebut sebagai bentuk objektivitas semu karena pers terlihat objektif, tetapi hanya menyajikan sebagian kenyataan (Peterson, 1963, p. 88). Oleh karena itu, tanggung jawab pers juga mencakup pemberian konteks yang membantu masyarakat memahami makna suatu peristiwa.

Perbedaan lain antara teori libertarian dan *Social Responsibility Theory* terdapat pada cara keduanya memahami kebebasan. Peterson menjelaskan

bahwa teori libertarian bertumpu pada kebebasan negatif atau “*freedom from*”, yaitu kebebasan dari hambatan dan campur tangan pihak luar (Peterson, 1963, pp. 93–94). Sebaliknya, *Social Responsibility Theory* bertumpu pada kebebasan positif atau “*freedom for*”, yaitu kebebasan yang disertai kemampuan dan sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Kebebasan yang hanya berarti bebas dari pembatasan dinilai sebagai “*an empty liberty*” apabila tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kebebasan pers tidak hanya berarti media bebas dari tekanan, tetapi juga bebas dan mampu menyediakan informasi yang diperlukan publik.

Pandangan tersebut membuat kebebasan pers dipahami sebagai kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Komisi menyebutnya sebagai *accountable freedom*, yaitu kebebasan yang keberlanjutannya bergantung pada kesediaan pers untuk menerima dan menjalankan tanggung jawab sosialnya (Commission on Freedom of the Press, 1947, pp. 18–19). Tanggung jawab tersebut dijalankan melalui standar profesional dan kesadaran bersama dalam institusi pers. Komisi menjelaskan bahwa suatu profesi tidak hanya bergantung pada hati nurani masing-masing individu, tetapi juga memiliki kesadaran dan standar kelembagaan yang mengarahkan perilaku anggotanya (Commission on Freedom of the Press, 1947, p. 78).

Namun, tanggung jawab sosial tidak berarti media boleh memanipulasi fakta untuk menghasilkan pemberitaan yang terlihat positif. Komisi menegaskan bahwa pers tidak diminta untuk “*painting a rosy picture*”, melainkan tetap perlu melaporkan secara realistis berbagai keadaan yang mendukung maupun menghambat pencapaian tujuan sosial (Commission on Freedom of the Press, 1947, p. 27). Dengan demikian, tanggung jawab sosial tidak menghilangkan sikap kritis, proses verifikasi, dan independensi jurnalistik. Media tetap perlu menjelaskan keterbatasan, kegagalan, konflik, dan hambatan yang ditemukan dalam suatu persoalan.

Dalam penelitian ini, *Social Responsibility Theory* digunakan sebagai landasan normatif untuk memahami bagaimana media seharusnya

memberitakan persoalan sosial, khususnya kekerasan seksual sebagai isu yang sensitif dan berdampak luas. Tanggung jawab media dalam pemberitaan kekerasan seksual tidak cukup dipenuhi dengan menyajikan kronologi kasus secara tepat. Media juga perlu menempatkan peristiwa dalam konteks yang lebih luas, menggambarkan korban dan kelompok terdampak secara adil, dan menyediakan informasi yang dapat membantu masyarakat memahami pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan kekerasan seksual masih cenderung berorientasi pada masalah. Pemberitaan lebih banyak menekankan kronologi, konflik, dan proses kasus tanpa selalu menghadirkan konteks yang lebih luas, perspektif korban, atau pembahasan mengenai upaya penanganan (Musyafak et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip tanggung jawab sosial media dan praktik pemberitaan kekerasan seksual.

Dalam kondisi tersebut, pendekatan *constructive journalism* menjadi relevan untuk dikaji. *Social Responsibility Theory* tidak dapat disebut sebagai teori yang melahirkan *constructive journalism* karena teori tersebut telah dirumuskan jauh sebelum pendekatan ini berkembang. Hubungan keduanya dalam penelitian ini terletak pada kesesuaian prinsip normatifnya. Tuntutan agar pers menyajikan peristiwa dalam konteks yang memberikan makna sejalan dengan upaya *constructive journalism* memperluas pemberitaan dari sekadar insiden menuju gambaran persoalan yang lebih utuh.

Kesesuaian juga terlihat pada tuntutan agar pers menampilkan gambaran yang representatif mengenai kelompok-kelompok dalam masyarakat. Prinsip tersebut sejalan dengan upaya menghadirkan keberagaman perspektif dan menggambarkan korban dan kelompok rentan sebagai individu yang memiliki pengalaman, kebutuhan, serta kemampuan bertindak, bukan hanya sebagai objek pemberitaan. Selain itu, tuntutan untuk membahas berbagai kekuatan yang mendukung ataupun menghambat pencapaian tujuan sosial memberikan dasar

normatif bagi media untuk membahas upaya penanganan suatu masalah secara kritis.

Berdasarkan uraian tersebut, *Social Responsibility Theory* dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan normatif untuk menjelaskan pentingnya konteks, keberagaman perspektif, dan informasi yang berguna bagi kepentingan publik dalam pemberitaan kekerasan seksual. Teori ini tidak digunakan sebagai kerangka pengodean (*coding frame*) untuk menentukan keberadaan elemen dalam teks berita. Analisis terhadap penerapan *constructive journalism* dalam pemberitaan *Tempo.co* dilakukan dengan menggunakan enam elemen yang dikembangkan oleh Hermans dan Gyldensted (2018), sebagaimana dijelaskan pada subbab berikutnya.

2.2.2 Constructive Journalism

Constructive journalism atau Jurnalisme Konstruktif merupakan pendekatan baru dalam praktik jurnalistik. Konsep ini muncul sebagai respon terhadap kecenderungan berita arus utama yang terlalu menekankan konflik, krisis, dan penyimpangan sosial. Konsep *constructive journalism* berawal dari gagasan Cathrine Gyldensted (2011), jurnalis asal Denmark yang dalam tesis magisternya di University of Pennsylvania mengusulkan penerapan *positive psychology* ke dalam praktik jurnalisme, tetapi kala itu konsep ini masih belum terdefiniskan dengan baik secara akademik (McIntyre, 2015). Kemudian, pada 2015, Karen Elizabeth McIntyre (2015) melalui disertasinya di University of North Carolina at Chapel Hill merumuskan konsep ini sehingga terdefiniskan dengan baik. Karen McIntyre (2015) mendefinisikan secara langsung bahwa

constructive journalism is an emerging form of journalism that applies techniques from the field of positive psychology to news work in an effort to create more productive, engaging news stories while remaining committed to journalism's core functions (McIntyre, 2015, p. 9).

Pada tahun yang sama, Catherine Gyldensted (2015) memperluas temuan McIntyre dalam buku *From Mirrors to Movers*. Keduanya kemudian berkolaborasi dalam artikel *Constructive Journalism: Applying Positive Psychology Techniques to News Production* (2017) yang menggabungkan konsep teori dengan cara penerapannya (McIntyre & Gyldensted, 2017).

Dalam perkembangannya, *constructive journalism* sering disamakan dengan *solutions journalism* karena keduanya sama-sama berfokus pada pemberitaan yang menyoroti upaya pemecahan masalah sosial. Namun, McIntyre dan Gyldensted (2017) menegaskan bahwa keduanya berbeda dalam ruang lingkup dan tujuan. Keduanya sama-sama muncul sebagai respon terhadap bias negatif (*negativity bias*) dalam berita arus utama dan berupaya menghadirkan pendekatan pemberitaan yang lebih seimbang. *Constructive journalism* berakar pada *positive psychology*, menekankan keseimbangan, dan tanggung jawab sosial dalam pemberitaan. Pendekatan ini berupaya memperluas bingkai berita agar tidak berhenti pada pemaparan masalah, tetapi juga menghadirkan konteks, peluang, dan perspektif masa depan dalam teks berita (Gyldensted, 2015; Hermans & Gyldensted, 2018)

Sementara itu, *Solutions Journalism* berfokus secara khusus pada pelaporan berbasis bukti tentang bagaimana suatu masalah sosial diatasi, dengan menelusuri proses, efektivitas, dan keterbatasan solusi yang diambil, tanpa bermaksud membela atau menganjurkan solusi tertentu (K. McIntyre, 2019; Beck & Daoust-Boisvert, 2025). Hal ini menjadi penguat bahwa *constructive journalism* hadir sebagai cara pandang jurnalisme yang baru, dengan dasar keseimbangan antara fungsi kritis (mengawasi) dan fungsi konstruktif (membangun).

Constructive journalism berkembang sebagai respons terhadap kecenderungan pemberitaan arus utama yang terlalu menekankan konflik, krisis, dan aspek negatif dalam berita (McIntyre, 2015). Pendekatan ini hadir untuk menawarkan alternatif penyajian berita yang lebih seimbang, tanpa menghilangkan fungsi kritis jurnalisme. McIntyre dan Gyldensted (2017)

menegaskan bahwa *constructive journalism* bukanlah jurnalisme yang meniadakan konflik, melainkan pendekatan yang tetap mempertahankan pelaporan masalah sambil memperluas perspektif melalui penambahan konteks, solusi, dan kemungkinan perbaikan sosial. Hermans dan Gyldensted (2018) juga menyebutkan bahwa pendekatan ini dilakukan dengan menambahkan orientasi solusi (*solution orientation*) dan pemberdayaan (*empowerment*) dalam pbingkaian berita.

Dalam konteks pemberitaan kekerasan seksual, pendekatan ini menjadi relevan karena isu tersebut umumnya disajikan secara *problem-oriented*, dengan penekanan pada peristiwa, pelaku, dan dampak, tanpa diikuti dengan pembahasan solusi atau upaya penanganan yang lebih luas. Oleh karena itu, *constructive journalism* digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji pbingkaian berita kekerasan seksual yang tidak hanya berfokus pada masalah, tetapi juga mencakup konteks, perspektif, dan kemungkinan penyelesaian dalam teks pemberitaan.

Selanjutnya, Hermans dan Gyldensted (2018) menyebutkan bahwa pada 2016, Departemen Jurnalistik Windesheim University of Applied Sciences di Belanda mengembangkan klasifikasi elemen konstruktif sebagai panduan praktik dan pembelajaran. Dalam klasifikasi tersebut, terdapat enam elemen utama yang menjadi prinsip dasar jurnalisme konstruktif, yaitu

1. *Solutions* (Solusi)

Elemen ini menekankan bahwa setiap liputan terkait masalah sosial sebaiknya tidak berhenti pada penggambaran konflik saja, tetapi juga menambahkan sudut pandang yang berorientasi pada solusi. Dalam konteks pemberitaan kekerasan seksual, elemen ini dapat terlihat melalui penyajian upaya penanganan kasus, kebijakan perlindungan korban, peran institusi, dan inisiatif komunitas dalam mencegah serta menangani kekerasan seksual. Dengan demikian, berita tidak hanya berfokus pada kasus dan pelaku, tetapi juga pada langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi

permasalahan tersebut. Contohnya, kampus membentuk Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual dan menyediakan *hotline* pengaduan yang mudah diakses mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat mekanisme penanganan yang dapat dimanfaatkan sehingga pembaca memahami langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan sekitarnya.

2. *Future orientation* (Orientasi masa depan)

Elemen ini memperluas lima pertanyaan dasar jurnalisme (*who, what, where, when, why, how*) dengan satu pertanyaan tambahan, yaitu “*what now?*”, yaitu apa yang dapat terjadi selanjutnya. Orientasi ini memberikan pandangan ke depan (*forward-looking perspective*) yang membantu audiens membayangkan masa depan yang lebih baik, peluang untuk berubah, dan bagaimana masyarakat bisa mewujudkannya sendiri. Perbedaannya dengan elemen solusi, elemen ini lebih menekankan pada langkah lanjutan atau rencana ke depan yang menunjukkan arah penanganan suatu isu. Dalam pemberitaan kekerasan seksual, orientasi ini dapat terlihat melalui penyajian rencana atau langkah lanjutan setelah kasus terjadi, seperti perubahan kebijakan, program pencegahan, atau upaya jangka panjang dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman. Dengan demikian, pemberitaan tidak hanya berfokus pada peristiwa dan penanganan yang telah ada, tetapi juga menampilkan arah penanganan ke depan. Contohnya, setelah kasus kekerasan seksual terungkap, kampus menyatakan akan merevisi peraturan internal, mewajibkan edukasi *consent* bagi mahasiswa baru, dan memperkuat sistem pelaporan berbasis digital. Hal ini menunjukkan adanya langkah lanjutan yang direncanakan sehingga pembaca memahami arah perubahan yang akan dilakukan untuk mencegah kasus serupa di masa depan.

3. *Inclusiveness and diversity* (Inklusivitas dan keberagaman)

Elemen ini menekankan pentingnya melibatkan beragam suara, sumber, dan pengalaman dalam setiap pemberitaan. Dengan melibatkan berbagai perspektif, jurnalisme konstruktif berupaya melawan dinamika polarisasi yang sering kali diperkuat oleh media arus utama, dan menampilkan gambaran realitas sosial yang lebih seimbang dan inklusif bagi audiens. Dalam konteks kekerasan seksual, hal ini dapat diwujudkan melalui pelibatan berbagai pihak, seperti korban (dengan tetap memperhatikan etika), pendamping korban, lembaga perlindungan, ahli, dan pihak institusi terkait. Contohnya, sebuah berita tidak hanya mengutip pernyataan pihak kampus atau aparat, tetapi juga menghadirkan perspektif korban, psikolog, dan lembaga pendamping korban. Pendekatan ini memungkinkan pemberitaan yang lebih komprehensif dan tidak didominasi oleh satu sudut pandang tertentu.

4. *Empower people* (Memberdayakan masyarakat)

Elemen ini mengubah fokus jurnalisme dari sekadar menggambarkan korban atau krisis menjadi pemberitaan yang menumbuhkan rasa mampu (*empowerment*). Jurnalis diharapkan mengajukan pertanyaan yang membuka peluang kolaborasi, solusi bersama, dan penggalan potensi sumber daya masyarakat sehingga audiens merasa memiliki peran dalam perubahan sosial. Dalam pemberitaan kekerasan seksual, elemen ini dapat terlihat melalui penekanan pada peran komunitas, lembaga pendamping, ataupun individu dalam memberikan dukungan, edukasi, atau advokasi terkait isu tersebut. Contohnya, pemberitaan menampilkan inisiatif komunitas mahasiswa yang mengadakan kampanye edukasi tentang *consent* dan menyediakan ruang aman untuk korban berbagi pengalaman. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran aktif dalam penanganan isu sehingga pembaca memahami

bahwa mereka juga dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman.

5. *The Rosling (Providing Context)* (Memberikan konteks)

Elemen ini diberi nama oleh Hans Rosling, pakar statistik dan edukator yang dikenal karena kemampuannya menjelaskan data secara sederhana. Sejalan dengan pendekatan Rosling, elemen ini menekankan pentingnya penyajian konteks dan data untuk memperjelas isu yang kompleks. Tujuannya adalah agar berita tidak hanya berfokus pada insiden, tetapi juga menjelaskan akar masalah dan pola yang mendasarinya. Dalam pemberitaan kekerasan seksual, konteks dapat berupa data kasus, pola kejadian, faktor sosial-budaya, dan kelemahan sistem yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual. Contohnya, berita tidak hanya melaporkan satu kasus kekerasan seksual, tetapi juga menyertakan data peningkatan kasus di lingkungan kampus dalam beberapa tahun terakhir, dan menjelaskan faktor seperti relasi kuasa atau budaya *victim blaming*. Hal ini membantu pembaca memahami bahwa kasus tersebut merupakan bagian dari masalah yang lebih luas, bukan sekadar insiden tunggal. Dengan adanya konteks, pemberitaan tidak hanya berfokus pada satu peristiwa, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap masalah yang diangkat.

6. *Co-creation* (Kolaborasi)

Elemen terakhir ini menyoroti peran aktif publik dalam proses jurnalistik. Melalui partisipasi warga, kolaborasi, atau jurnalisme berbasis komunitas, elemen akan memperkuat hubungan antara media dengan masyarakat. Tujuannya untuk menjadikan audiens bagian dari proses produksi berita, bukan sekadar penerima informasi pasif. Dalam konteks kekerasan seksual, hal ini dapat terlihat melalui pelibatan organisasi masyarakat sipil, komunitas advokasi, dan partisipasi publik dalam penyebaran informasi dan

peningkatan kesadaran. Contohnya, media bekerja sama dengan organisasi advokasi perempuan untuk mengangkat data kasus dan menyediakan informasi layanan bantuan, atau membuka ruang bagi publik untuk berbagi pengalaman secara anonim. Hal ini menunjukkan adanya kolaborasi dalam penyampaian informasi sehingga pemberitaan menjadi lebih partisipatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep *constructive journalism* relevan digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjawab persoalan utama dalam pemberitaan kekerasan seksual, yakni kecenderungan media yang masih menampilkan isu tersebut secara *problem-oriented*, sensasional, dan bias terhadap korban. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan kekerasan seksual masih diwarnai oleh penggunaan bahasa yang stereotipikal, bahasa yang diperhalus (eufemistik), dan kecenderungan memarginalkan atau meragukan posisi korban (Aroustamian, 2020; Safira et al., 2022). Selain itu, praktik pemberitaan juga kerap mereproduksi bias gender dan lebih mengedepankan perspektif institusi dibandingkan pengalaman korban sehingga memperkuat ketimpangan representasi dalam media (Musyafak et al., 2022).

Dalam konteks yang lebih luas, dominasi pemberitaan negatif dan berorientasi konflik juga menjadi karakteristik jurnalisme konvensional yang cenderung menekankan krisis tanpa menghadirkan konteks maupun solusi (Bulendu & Yanqiu, 2024). Oleh karena itu, *constructive journalism* hadir sebagai pendekatan alternatif yang menyeimbangkan pemberitaan dengan menghadirkan solusi, konteks, serta perspektif yang lebih komprehensif (Zhao & Xiang, 2023). Pendekatan ini juga dinilai mampu mengurangi dominasi pemberitaan negatif dan mendorong penyajian berita yang lebih seimbang (Theodora & Prestianta, 2022). Dengan demikian, *constructive journalism* menjadi kerangka konseptual yang tepat untuk menelaah bagaimana pemberitaan kekerasan seksual, khususnya di media daring seperti *Tempo.co*,

dikonstruksi tidak hanya sebagai peristiwa problematis, tetapi juga sebagai isu sosial yang menghadirkan perspektif solusi dan arah perubahan yang lebih konstruktif.

Hal yang perlu diperhatikan adalah enam elemen yang dikembangkan oleh Hermans dan Gyldensted (2018) bukan merupakan satu-satunya cara untuk memahami dan mengoperasionalkan *constructive journalism*. McIntyre dan Gyldensted (2017) menjelaskan bahwa pendekatan ini masih memiliki beragam definisi dan bentuk penerapan sehingga implementasinya dapat mengikuti kerangka yang berbeda sesuai dengan konteks masing-masing organisasi media. Dalam konteks *Tempo.co*, pelatihan *constructive journalism* yang diterima jurnalis senior dilakukan melalui kerja sama dengan International Media Support (IMS).

Dalam buku panduannya, IMS merumuskan *constructive journalism* ke dalam tiga pilar, yaitu *focus on solutions*, *focus on the bigger picture and nuance*, dan *democratic conversation* (Jørgensen & Risbro, 2021). Pilar *focus on solutions* menempatkan respons dan upaya penyelesaian masalah sebagai bagian penting pemberitaan, bukan sekadar pelaporan persoalan. Pilar *focus on the bigger picture and nuance* menekankan penyajian persoalan secara lebih luas dan bernuansa sehingga berita tidak berhenti pada satu peristiwa yang terisolasi. Sementara itu, pilar *democratic conversation* menekankan peran media dalam membuka ruang percakapan dan keterlibatan publik terhadap isu yang diberitakan.

Meskipun dikembangkan secara terpisah, enam elemen Hermans dan Gyldensted (2018) dan tiga pilar IMS tidak sepenuhnya berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan karena keduanya bertolak dari gagasan dasar yang sama mengenai *constructive journalism*. Perbedaannya terletak pada tingkat kerinciannya: tiga pilar IMS bersifat lebih ringkas dan luas, sedangkan enam elemen bersifat lebih terurai. Oleh karena itu, hubungan keduanya lebih tepat dipahami sebagai hubungan yang bersifat banyak-ke-satu, yaitu ketika beberapa elemen dapat dikelompokkan di bawah satu pilar yang sama.

Secara konseptual, pilar *focus on solutions* beririsan dengan elemen *solutions*, karena keduanya menempatkan respons terhadap masalah sebagai bagian penting pemberitaan. Pilar *focus on the bigger picture and nuance* dapat menaungi elemen *providing context* dan, sebagian, elemen *inclusiveness and diversity*, karena ketiganya sama-sama berupaya memperluas gambaran persoalan melampaui satu peristiwa tunggal. Sementara itu, pilar *democratic conversation* berkaitan dengan elemen *co-creation* yang menekankan keterlibatan publik dalam pemberitaan.

Namun, keterkaitan tersebut tidak sepenuhnya menyeluruh. Dua elemen dalam kerangka Hermans dan Gyldensted (2018), yaitu *future orientation* dan *empower people*, tidak memiliki padanan yang langsung dengan salah satu pilar IMS, atau hanya berkaitan secara longgar. Dengan demikian, kedua kerangka ini dapat dipahami sebagai saling terkait, tetapi dengan keterkaitan yang bersifat parsial dan tidak simetris.

Dalam penelitian ini, kedua kerangka tersebut menempati posisi yang berbeda. Enam elemen Hermans dan Gyldensted (2018) digunakan sebagai alat untuk menganalisis teks pemberitaan, sedangkan tiga pilar IMS merupakan kerangka yang berorientasi pada praktik peliputan di ruang redaksi. Meskipun kerangka praktik yang digunakan redaksi tidak selalu identik dengan enam elemen tersebut, penelitian ini tetap menggunakan enam elemen sebagai kerangka analisis utama karena tingkat kerinciannya memungkinkan peneliti membaca karakteristik *constructive journalism* secara lebih rinci di dalam teks. Adapun kesesuaian antara kerangka praktik redaksi dan pola kemunculan elemen-elemen tersebut akan dibahas lebih lanjut pada bagian hasil dan pembahasan.

2.3 Alur Penelitian

Penelitian ini berangkat dari permasalahan pemberitaan kekerasan seksual yang masih cenderung berorientasi pada masalah (*problem-oriented*), dengan penekanan pada kronologi, konflik, dan proses kasus, tetapi belum selalu

menghadirkan konteks yang lebih luas, keberagaman perspektif, serta informasi mengenai upaya penanganan. Dalam konteks tersebut, media dipandang memiliki tanggung jawab sosial untuk tidak hanya menyampaikan fakta secara akurat, tetapi juga menyajikan informasi yang menyeluruh, bermakna, representatif, dan sesuai dengan kebutuhan publik. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *Social Responsibility Theory* sebagai landasan normatif untuk menjelaskan pentingnya tanggung jawab media dalam pemberitaan persoalan sosial, khususnya kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan konsep *constructive journalism* sebagai kerangka konseptual untuk mengkaji bagaimana pemberitaan tidak hanya memaparkan masalah, tetapi juga menghadirkan konteks, keberagaman perspektif, orientasi solusi, pemberdayaan, dan kemungkinan perbaikan. Analisis terhadap teks berita dilakukan menggunakan enam elemen *constructive journalism* yang dikembangkan oleh Hermans dan Gyldensted (2018), yaitu *solutions*, *future orientation*, *inclusiveness and diversity*, *empower people*, *providing context*, dan *co-creation*. Keenam elemen tersebut digunakan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan penerapan *constructive journalism* dalam pemberitaan *Tempo.co* mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Selain analisis teks, penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dengan pihak redaksi untuk memahami pemahaman jurnalis mengenai *constructive journalism*, proses penerapannya dalam produksi berita, serta pertimbangan editorial yang melatarbelakangi penyajian unsur-unsur konstruktif dalam teks berita. Penggunaan kedua sumber data tersebut memungkinkan penelitian melihat penerapan *constructive journalism* tidak hanya dari hasil akhir berupa teks berita, tetapi juga dari praktik redaksional yang mendasarinya. Pendekatan ini sesuai dengan fokus studi kasus instrumental yang menggunakan *Tempo.co* sebagai kasus untuk memahami penerapan konsep *constructive journalism* dalam konteks pemberitaan kekerasan seksual.